

---

**Efektivitas Reviu Berjenjang Hasil Pengawasan di Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2025****Ningsih Rante Toding <sup>1</sup>****Sofia Pangemanan <sup>2</sup>****Gustaf Undap <sup>3</sup>***Email Korespondensi:* [ningsihtoding083@student.unsrat.ac.id](mailto:ningsihtoding083@student.unsrat.ac.id)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan reviu berjenjang dalam hasil pengawasan pada Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2025. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, yang ditandai dengan keterbatasan waktu pelaksanaan, kurangnya jumlah auditor yang kompeten, serta potensi maladministrasi yang berdampak pada kualitas hasil pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan informan yang terdiri atas auditor pelaksana, pengendali teknis, pengendali mutu, dan inspektur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada indikator efektivitas organisasi menurut Gibson, yang meliputi efisiensi penggunaan sumber daya, kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, pemeliharaan motivasi dan kepuasan kerja, serta pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu berjenjang belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kendala dalam efisiensi pelaksanaan, kemampuan adaptasi yang belum optimal, tekanan kerja yang memengaruhi kinerja pegawai, serta belum optimalnya pencapaian tujuan akibat keterbatasan akses terhadap data dan belum maksimalnya transparansi. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan manajemen waktu dalam pelaksanaan pengawasan agar proses reviu berjenjang berjalan lebih optimal dan berkualitas. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan tertib administrasi dari pihak terkait guna mendukung efektivitas dan transparansi hasil pengawasan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Reviu Berjenjang, Pengawasan, Inspektorat Daerah**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

## Pendahuluan

Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Fungsi pengawasan yang dilakukan mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan adalah penerapan reviu berjenjang.

Reviu berjenjang merupakan proses pengendalian mutu yang dilakukan secara sistematis dan bertingkat, mulai dari auditor pelaksana, ketua tim, pengendali teknis, hingga pengendali mutu. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan kesalahan dalam hasil pengawasan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi auditor, khususnya dalam meningkatkan kapasitas teknis dan profesionalisme.

Dalam struktur organisasi Inspektorat Daerah, terdapat pembagian tugas pengawasan melalui Inspektur Pembantu (Irban) yang bertanggung jawab atas wilayah atau sektor tertentu. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di Provinsi Sulawesi Utara, setiap Irban memiliki tanggung jawab terhadap perangkat daerah yang berbeda, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan yang serupa, mulai dari perencanaan hingga

pelaporan hasil pengawasan. Pelaksanaan reviu berjenjang dalam praktiknya dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pemeriksaan dokumen, koreksi hasil temuan, supervisi, hingga persetujuan akhir oleh pejabat berwenang. Setiap tahapan melibatkan proses evaluasi yang mendalam guna memastikan bahwa laporan hasil pengawasan telah memenuhi standar audit pemerintah, serta memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, hasil reviu diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Meskipun secara normatif mekanisme reviu berjenjang telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat, keterbatasan anggaran, serta tekanan birokrasi yang memengaruhi independensi pengawasan. Selain itu, budaya akuntabilitas yang belum optimal di lingkungan perangkat daerah turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual di lapangan juga terlihat dalam praktik penyusunan laporan hasil pengawasan yang sering dilakukan secara terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu. Hal ini berdampak pada kualitas hasil reviu yang belum optimal, sehingga rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reviu berjenjang tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan integritas pelaksana pengawasan.

Selain itu, adanya potensi maladministrasi dan konflik kepentingan dalam proses pengawasan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga objektivitas dan independensi hasil rewiu. Reviu berjenjang seharusnya menjadi mekanisme kontrol yang mampu meminimalkan risiko tersebut, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas penerapan mekanisme rewiu berjenjang di lingkungan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan rewiu berjenjang di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam pengawasan pada Dinas Pendidikan. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana mekanisme tersebut mampu meningkatkan kualitas hasil pengawasan, mengurangi kesalahan dan penyimpangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu yang pertama Titof Pangemanan, Engeline C. Kawatu, Vekie A. Rimate (2023) berjudul "Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Kualitatif (studi kasus, wawancara, observasi, analisis dokumen) yang bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan review LKPD melalui mekanisme review berjenjang di Inspektorat Sulut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian rewiu LKPD sudah berjalan sesuai pedoman, mekanisme review

berjenjang efektif meningkatkan kualitas laporan, tetapi masih terkendala waktu, mutasi pegawai, dan koordinasi antar perangkat

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rahmatullah Rahmatullah, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru berjudul "Analisi Efektifitas Tugas Inspektorat Kabupaten Sinjai Dalam Pengawasan Dana Desa" Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat Kabupaten Sinjai dan Aparat Penegak Hukum (APH). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas, sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak diserahkan kepada pihak APH dan potensi penyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami

pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Suharni Suharnil(2024) Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana Implementasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa dan bagaimana Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa dan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pinrang terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, model data/penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan dalam kegiatan yang dinamakan pemeriksaan regular untuk memastikan bahwa kegiatan dana desa yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari penyusunan APBDesa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, dimana seluruh tahapan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan, sehingga tujuan untuk mewujudkan

good governance. Selain itu, pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang telah efektif dari segi keakuratan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, objektif dan menyeluruh. Namun, proses pengawasan tidak efektif dari segi terpusat dengan tidak memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan efektivitas rewiu berjenjang di Inspektorat Daerah mulai dari tingkat pelaksana auditor hingga tingkat inspektur . Ini sesuai dengan ciri penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam, bukan pengukuran angka. Data yang diperlukan berupa pengalaman, persepsi, dan interpretasi dari auditor, pengendali teknis, maupun pejabat Inspektorat, sehingga lebih cocok dikaji melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian diharapkan berupa gambaran menyeluruh dan pemahaman kontekstual tentang efektivitas rewiu berjenjang, bukan sekadar hubungan variable kualitatif.

Fokus penelitian ini berfokus pada teori Efektifitas oleh Gibson Gibson (2009) dalam karyanya yang berjudul Organizations: Behavior, Structur, Presesses, yang diterbitkan pada 7 maret 2005 oleh McGraw-Hill, dengan 4 indikator yaitu

- 1.Menggunakan sumber daya secara efisien.
- 2.Menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
- 3.Memelihara motivasi dan kepuasan kerja pegawai.
- 4.Mencapai tujuan yang telah ditetapkan (goal attainment). lokasi

penelitian terletak di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan informan dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat yang berada di wilayah 3 yang menjalankan tugas revidu berjenjang di antaranya adalah tim auditor pelaksana, pengendali teknis, pengendali mutu, dan terakhir oleh inspektur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara utama yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai proses revidu berjenjang hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan untuk melihat bagaimana proses kerja dalam revidu berjenjang hasil pengawasan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen tertulis seperti arsip, laporan, peraturan, serta catatan yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Teknik Keabsahan Data Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas.

Perpanjangan Pengamatan dilakukan dengan peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini

setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya, Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak, Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

## Pembahasan

### 1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan revidu berjenjang pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun pelaksanaan pengawasan telah mengacu pada Program Kerja Audit (PKA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan revidu berjenjang yang sistematis, masih terdapat kendala dalam pemanfaatan waktu dan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan waktu penugasan yang relatif singkat serta keterlambatan penyediaan dokumen dari pihak Dinas Pendidikan menyebabkan proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, sebagian waktu tim pemeriksa tersita untuk menunggu kelengkapan dokumen, sehingga mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk analisis mendalam terhadap temuan. Selain itu, proses

reviu yang dilakukan oleh atasan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif seperti kelengkapan dokumen dan sistematika laporan, dibandingkan pada penguatan substansi temuan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya waktu dan tenaga kerja, masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kualitas hasil pengawasan secara lebih optimal.

## 2. Kemampuan Adaptasi Organisasi

Kemampuan adaptasi organisasi dalam pelaksanaan pengawasan menunjukkan adanya upaya penyesuaian terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan, khususnya terkait keterlambatan penyampaian dokumen oleh pihak Dinas Pendidikan. Tim pemeriksa secara aktif melakukan koordinasi dengan ketua tim dan pengendali teknis untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, serta memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, langkah klarifikasi langsung terhadap temuan juga dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diperoleh. Hal ini mencerminkan bahwa organisasi memiliki mekanisme respons yang cukup baik dalam menjaga keberlangsungan proses pengawasan. Namun demikian, kemampuan adaptasi tersebut masih bersifat reaktif, di mana tindakan penyesuaian baru dilakukan setelah kendala terjadi. Belum terdapat sistem atau strategi yang bersifat preventif untuk mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem pengendalian internal agar organisasi dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

## 3. Memelihara Motivasi dan Kompetensi Pegawai (Integrasi Organisasi)

Integrasi organisasi dalam pelaksanaan reviu berjenjang telah berjalan melalui pola kerja sama yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari anggota tim, ketua tim, hingga pengendali teknis dan pengendali mutu. Setiap tahapan memiliki peran dalam memastikan kualitas laporan hasil pengawasan, mulai dari penyusunan kertas kerja, pemeriksaan kesesuaian prosedur, hingga validasi atribut temuan. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi dan hubungan kerja yang cukup baik dalam tim. Namun demikian, efektivitas integrasi tersebut masih dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kompetensi antar anggota tim. Anggota tim yang memiliki pengalaman terbatas cenderung membutuhkan arahan lebih intensif dalam memahami standar audit dan teknik pemeriksaan, sehingga berdampak pada proses penyusunan dan analisis temuan. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengawas juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas kinerja tim secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan proses reviu terkadang lebih berfokus pada aspek administratif daripada pendalaman substansi temuan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk memperkuat integrasi dan kualitas kerja tim pengawasan.

## 4. Pencapaian Tujuan Organisasi (Goal Attainment)

Pencapaian tujuan organisasi dalam pelaksanaan reviu berjenjang menunjukkan hasil yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Proses reviu yang dilakukan secara berlapis telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan, terutama dalam hal validitas, kelengkapan bukti, serta kesesuaian dengan standar yang berlaku. Temuan-temuan yang dihasilkan juga telah disertai dengan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan administrasi dan aset pada Dinas Pendidikan. Selain

itu, adanya mekanisme penyampaian laporan kepada pihak yang diaudit untuk memperoleh tanggapan juga menunjukkan upaya dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan waktu penugasan, perbedaan kompetensi anggota tim, serta kurangnya pelatihan masih mempengaruhi kualitas proses reviu, khususnya dalam hal kedalaman analisis substansi temuan. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap data yang bersifat signifikan karena alasan kerahasiaan juga menjadi hambatan dalam melakukan analisis secara komprehensif. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan pengawasan, terutama dalam menghasilkan laporan yang sepenuhnya transparan, akurat, dan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reviu berjenjang dalam pengawasan pada Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan efektif jika ditinjau dari indikator efektivitas organisasi menurut Gibson.

Dari aspek efisiensi, masih terdapat kendala keterbatasan waktu dan perbedaan kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya belum optimal. Dari aspek adaptasi, mekanisme reviu telah menunjukkan upaya penyesuaian melalui koordinasi, namun masih bersifat situasional dan belum sistematis. Dari aspek motivasi kerja, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu berpotensi menurunkan kualitas kerja dan kepuasan pegawai. Sementara itu, dari aspek pencapaian tujuan, hasil pengawasan belum optimal akibat keterbatasan akses data serta belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara sistem reviu yang telah dirancang dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam hal efisiensi, kualitas SDM, dan transparansi pengawasan.

### Saran

1. Inspektorat Daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengawasan dan audit guna memperkuat kualitas analisis hasil pemeriksaan,
2. Perlu dilakukan perbaikan manajemen waktu agar setiap tahapan reviu berjenjang dapat berjalan optimal dan tidak sekadar bersifat administratif,
3. Dinas Pendidikan diharapkan meningkatkan tertib administrasi dan ketepatan waktu dalam penyediaan dokumen untuk mendukung kelancaran proses pengawasan,
4. Inspektorat Daerah Provinsi SULUT perlu memperkuat koordinasi dan sistem pengendalian internal guna mengantisipasi kendala teknis sejak tahap perencanaan pengawasan

### Daftar Pustaka

- Beni. 2016. *Manajemen Kinerja: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, A., dan S. Rahayu. 2021. "Pengaruh Reviu Berjenjang terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 7(2): 115–128.
- Friesta, Angela Luciana S., dan Choirunnisa Arifa. 2022. "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Prabumulih." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 1(2).
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly Jr., dan Robert Konopaske. 2009. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill.
- Hendriyani, I., dan A. Syarif. 2020.

- "Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6(2).
- Hidayat, R. 2022. *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inspektorat Daerah*.
- Kurniawan, A. 2018. *Audit Internal Sektor Publik: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, D. 2023. *Manajemen Efektif di Era Digital: Teknologi dan Kepuasan Stakeholder*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pangemanan, T., Engeline C. Kawatu, dan Vekie A. Rimate. 2023. "Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Governance* 3(4).
- Rahman, F., dan S. Utami. 2021. *Efektivitas Manajemen Modern dan Adaptasi terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. 2019. *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Saragi, A., dan H. Nasution. 2020. *Teori Efektivitas Organisasi Publik*. Medan: USU Press.
- Sari, D. P., dan H. Nugroho. 2020. "Efektivitas Peran APIP dalam Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* 9(1): 45–57.
- Sedarmayanti. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. 2022. "Kapabilitas APIP dan Penguatan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia* 14(3): 201–218.
- Sutrisno. 2020. *Etika Pengawasan dan Disiplin Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wibowo. 2024. *Manajemen Kinerja dan Efektivitas Organisasi Responsif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

